

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Notohadiprowiro dalam Dwipradnyana (2014), secara spesifik lahan merupakan sumberdaya pembangunan yang memiliki karakteristik ketersediaan atau luasnya relatif tetap karena perubahan luas akibat proses alami (sedimentasi) dan proses artifisial (reklamasi) sangat kecil. Selain itu kesesuaian lahan dalam menampung kegiatan masyarakat juga cenderung bersifat spesifik karena lahan memiliki perbedaan sifat fisik seperti jenis batuan, kandungan mineral, topografi dan lain sebagainya.

Permintaan lahan dipengaruhi oleh dua jenis permintaan yaitu *direct demand* (permintaan langsung) dan *derived demand* (pendorong permintaan). Dalam *direct demand*, lahan berfungsi sebagai barang konsumsi atau untuk pemukiman dan secara langsung memberikan utilitas. Melalui *derived demand*, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Untuk memproduksi barang dan jasa tersebut diperlukan lahan sebagai faktor produksi dimana lahan ini tidak memberikan utilitas secara langsung tetapi diperoleh dari konsumsi barang dan jasa. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan dan papan yang semakin meningkat, permintaan akan lahan juga ikut mengalami peningkatan padahal ketersediaannya semakin terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya, solusi yang sering dilakukan masyarakat adalah merubah penggunaan lahan dari satu penggunaan ke penggunaan yang lainnya atau biasa disebut konversi lahan (Dwipradnyana, 2014).

Perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai perubahan besaran (bertambah atau berkurang) dari suatu jenis penggunaan atau tutupan lahan. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan karena mekanisme pasar. Konversi lahan dari pertanian ke non pertanian terjadi secara meluas sejalan dengan

kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi kepada investor (Widjanarko *et al.*, 2006).

Konversi lahan bersifat dinamis, dan perubahannya cenderung mengarah kepada penggunaan lahan yang memberikan surplus lahan yang lebih tinggi. Seringkali terjadi peran sektor yang tidak terkendali karena tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dan tanpa arahan strategi pelaksanaannya. Salah satunya adalah konversi lahan pertanian. Lahan pertanian dapat memberikan banyak manfaat dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, konversi lahan yang menjadikan semakin sempitnya lahan pertanian akan mempengaruhi segi ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut. Jika konversi lahan terus dilakukan dan tidak terkendali, maka hal ini bisa menjadi masalah nasional bangsa Indonesia. Konversi lahan pertanian akan sangat berkaitan dengan kesejahteraan petani karena lahan merupakan sumber kehidupan para petani (Dwipradnyana, 2014).

Konversi lahan sawah menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan produksi padi sawah, di samping akibat terjadinya serangan hama, kekeringan, banjir, rusaknya jaringan irigasi dan turunnya harga padi. Berbagai faktor tersebut dapat menimbulkan masalah pangan akibat hilangnya peluang produksi padi sawah baik akibat penurunan luas panen atau akibat penurunan produktivitas usahatani. Peluang produksi yang hilang tersebut ada yang bersifat temporer dan ada pula yang bersifat permanen. Pada kasus konversi lahan masalah pangan yang ditimbulkan akan terasa dalam jangka panjang meskipun konversi lahan sudah tidak terjadi lagi. Hal ini karena lahan sawah yang sudah dikonversi ke penggunaan non pertanian tidak pernah berubah kembali menjadi lahan sawah atau bersifat *irreversible* (Pakpahan, 1989).

Lahan sawah yang pada mulanya ditanami padi, setiap tahun banyak yang beralihfungsi untuk keperluan sektor non pertanian, seperti perumahan, kawasan industri, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cara menambah intensitas tanam untuk meningkatkan luas panen. Namun, peningkatan intensitas tanam tidak selamanya dapat mengatasi penurunan produksi yang terjadi

akibat konversi lahan, karena secara agronomis terdapat kondisi yang menyebabkan turunnya laju pertumbuhan produksi padi tersebut (Irawan, 2005).

Kota Padang Panjang dengan luas wilayah 2.300 Ha terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan jumlah kelurahan sebanyak 16 kelurahan. Posisi Kota Padang Panjang cukup strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, antara Kota Solok dengan Kota Bukittinggi dan antara Kota Batusangkar dengan Kota Bukittinggi. Kota Padang Panjang bersama Kota Solok dan Kota Batusangkar merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Namun, dalam perdagangan sayuran dan hortikultura lainnya Kota Padang Panjang merupakan pusat perdagangan antar wilayah (RPJP Kota Padang Panjang, 2009).

Secara perwilayahan Kota Padang Panjang dibagi atas 4 Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu BWK Pusat Kota, BWK I, BWK II, dan BWK III, dimana BWK III merupakan wilayah dengan fungsi primer pertanian, didukung oleh fungsi permukiman, kesehatan, dan konservasi. Kecenderungan perluasan kota berada di wilayah ini, sehingga masalah alih fungsi lahan akan terjadi. Sebagai daerah pegunungan dengan lahan yang relatif sempit Kota Padang Panjang memiliki kawasan terbangun yang cukup besar. Letaknya yang strategis sebagai pusat perdagangan sayuran regional dan berada di daerah lintasan antara beberapa kota di sekitarnya mengakibatkan konversi lahan cenderung meningkat dan merupakan ancaman terhadap lingkungan hidup (RPJP Kota Padang Panjang, 2009).

B. Rumusan Masalah

Dari sisi ekonomi, lahan merupakan input tetap utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non pertanian. Pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk cenderung menyebabkan naiknya permintaan komoditas non pertanian dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan permintaan komoditas pertanian. Peningkatan pendapatan penduduk juga akan menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian dengan laju yang lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan lahan

pertanian, sehingga nilai ekonomi lahan pertanian menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan lahan non pertanian. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang tinggi dan cepat, banyak petani pemilik lahan menjual atau mengkonversi lahannya menjadi lahan non pertanian.

Padang Panjang merupakan kota terkecil dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas lahan 2.300 Ha atau sekitar 0,05% dari luas Sumatera Barat. Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan dan 16 kelurahan. Kecamatan Padang Panjang Barat dengan luas wilayah 975 Ha memiliki 8 kelurahan dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas wilayah 1.325 Ha juga memiliki 8 kelurahan. Jika luas Padang Panjang dilihat berdasarkan jenis lahan, sebesar 630 Ha merupakan lahan sawah (27,4 %), 798 Ha lahan bukan sawah (34,7 %), dan 872 Ha lahan bukan pertanian (37,9 %) (Badan Pusat Statistik, 2013). Namun, penurunan luas lahan sawah di Kota Padang Panjang secara signifikan terjadi dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 58 Ha, dari 688 Ha pada tahun 2012 menjadi 630 Ha pada tahun 2016, atau rata-rata sebesar 6 Ha setiap tahunnya. Sementara, jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir telah bertambah sebanyak 2.993 jiwa atau secara rata-rata bertambah sebanyak 143 jiwa setiap tahun. Hal ini menunjukkan arah perkembangan penduduk juga tidak sejajar dengan arah perkembangan ketersediaan lahan (Syahni dkk, 2017).

Berkurangnya lahan pertanian di Kota Padang Panjang memiliki dampak positif dan negatif tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dampak negatif berkurangnya lahan pertanian diikuti oleh berkurangnya produksi pangan atau hortikultura. Namun positifnya, masyarakat yang memiliki lahan pertanian di lokasi strategis dapat membangun sarana fisik untuk keperluan lain yang menghasilkan pendapatan. Berkurangnya lahan pertanian di Kota Padang Panjang terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi pembangunan perumahan dan perkotaan serta kurangnya perhatian masyarakat untuk mempertahankan lahan agar tetap produktif juga berpotensi menyebabkan penyusutan lahan (Antara, 2014). Selain itu, perkembangan kawasan terbangun mulai cenderung ke bagian timur (Kecamatan

Padang Panjang Timur) karena adanya limitasi pengembangan daerah di kawasan barat kota, sehingga alih fungsi lahan mulai terjadi terutama lahan sawah.

Untuk itu perlu dikaji **“Karakteristik Rumah Tangga Petani dan Karakteristik Lahan Sawah yang Dikonversi di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik petani yang mengkonversi lahan sawah menjadi lahan non sawah di Kecamatan Padang Panjang Timur?
2. Bagaimana karakteristik lahan sawah yang dikonversi menjadi lahan non sawah di Kecamatan Padang Panjang Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik petani yang mengkonversi lahan sawah menjadi lahan non sawah di Kecamatan Padang Panjang Timur
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik lahan sawah yang dikonversi menjadi lahan non sawah di Kecamatan Padang Panjang Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai alih fungsi lahan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang serupa dengan penelitian ini.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai alih fungsi lahan dan pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan datang terkait dengan alih fungsi lahan.